

Integrasi Supervisi Klinis-Kolaboratif dan Teori Administrasi Sistem Berbasis Nilai Ta'awun dalam Mendorong Transformasi Mutu Lembaga Pendidikan Islam

Anita Rochayah ¹, Fahmi Rosyidah ², Kholifatul Ummah ³, Meti Fatimah ⁴

^{1,2,3,4} Institut Islam Mamba'ul Ulum Surakarta, Indonesia

Email: ¹⁾ anitarochayah@gmail.com

Received: July 13, 2026	Revised: August 14, 2026	Accepted: Sept 25, 2026	Online: Sept 30, 2026
-----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

Abstract

This study aims to examine the shift in the orientation of educational supervision and the application of administrative theories in the management of educational institutions, as well as to integrate these with the perspective of Islamic Religious Education (PAI). Using a qualitative approach in the form of library research, data were collected from authoritative managerial literature and analysed using content analysis. The results of the study indicate that the orientation of supervision has transformed from mere inspection towards a clinical and collaborative approach focused on the professional development of educators. On the other hand, the effectiveness of educational administration is achieved by synergising classical, human relations, behavioural and systems theories to manage the resource cycle comprehensively. The relationship between the two is functional and integrative; administration provides the management systems and structures, whilst supervision ensures the effectiveness of their implementation through guidance. Furthermore, from an Islamic Education (PAI) perspective, this governance framework of administration and supervision is not merely oriented towards managerial efficiency, but is imbued with moral values such as amanah (responsibility), justice, musyawarah (consultation), and ta'awun (mutual assistance). In conclusion, the synergy between structured administration and humanistic-religious supervision is an essential instrument in driving the transformation and holistic improvement of the quality of educational institutions.

Keywords: *Educational Administration; Quality of Education; Islamic Religious Education; Collaborative Supervision; Institutional Governance.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pergeseran orientasi supervisi pendidikan dan penerapan teori-teori administrasi dalam pengelolaan lembaga pendidikan, serta mengintegrasikannya dengan perspektif Pendidikan Agama Islam (PAI). Menggunakan pendekatan kualitatif jenis penelitian kepustakaan (library research), data dihimpun dari literatur manajerial otoritatif dan dianalisis melalui teknik analisis isi (content analysis). Hasil kajian menunjukkan bahwa orientasi supervisi telah bertransformasi dari sekadar inspeksi menuju pendekatan klinis dan kolaboratif yang berfokus pada pengembangan profesional pendidik. Di sisi lain, efektivitas administrasi pendidikan dicapai dengan menyinergikan teori klasik, hubungan manusiawi, perilaku, dan sistem untuk mengelola siklus sumber daya secara komprehensif. Hubungan keduanya bersifat fungsional dan integratif; administrasi menyediakan sistem dan struktur pengelolaan, sedangkan supervisi memastikan efektivitas pelaksanaannya melalui pembinaan. Lebih lanjut, dalam perspektif PAI, tata kelola administrasi dan supervisi ini tidak hanya berorientasi pada efisiensi manajerial, tetapi dijiwai oleh nilai-nilai moral seperti amanah (tanggung jawab), keadilan, musyawarah, dan ta'awun (tolong-menolong). Kesimpulannya, sinergi antara administrasi yang terstruktur dan supervisi yang humanistik-religius merupakan instrumen esensial dalam mendorong transformasi dan peningkatan mutu lembaga pendidikan secara holistik.

Kata Kunci: *Administrasi Pendidikan; Mutu Pendidikan; Pendidikan Agama Islam; Supervisi Kolaboratif; Tata Kelola Lembaga.*



1. Pendahuluan

Pendidikan merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan pengelolaan secara sistematis agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh proses pembelajaran di dalam kelas, tetapi juga dipengaruhi oleh bagaimana lembaga pendidikan mengelola berbagai sumber daya, merencanakan program, mengorganisasikan kegiatan, mengarahkan tenaga kependidikan, serta melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, administrasi pendidikan memiliki posisi penting sebagai landasan dalam mengatur dan mengelola seluruh komponen pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Administrasi pendidikan pada hakikatnya tidak hanya berkaitan dengan pekerjaan administratif dalam pengertian sempit, seperti pencatatan, pengarsipan, atau pengelolaan dokumen. Administrasi pendidikan merupakan suatu proses kerja sama yang sistematis dalam mengoptimalkan berbagai sumber daya pendidikan melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap teori administrasi pendidikan menjadi penting bagi pengelola lembaga pendidikan, terutama kepala sekolah dan tenaga kependidikan, agar pengelolaan pendidikan dapat dilakukan secara terarah, efektif, dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Di sisi lain, keberhasilan administrasi pendidikan perlu didukung oleh supervisi pendidikan yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Supervisi pendidikan merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya meningkatkan kualitas proses dan hasil pendidikan. Supervisi tidak semestinya dipahami hanya sebagai kegiatan pengawasan terhadap kinerja guru atau pencarian kesalahan dalam pelaksanaan pembelajaran. Supervisi pendidikan memiliki orientasi yang lebih luas, yaitu memberikan bantuan profesional, pembinaan, pendampingan, dan pengembangan kompetensi pendidik agar mampu melaksanakan tugasnya secara optimal. Dengan demikian, orientasi supervisi pendidikan mengalami perkembangan dari pendekatan yang bersifat inspeksi dan kontrol menuju pendekatan yang lebih humanis, kolaboratif, dan berorientasi pada pengembangan profesional.

Hubungan antara administrasi dan supervisi pendidikan menjadi semakin penting dalam menghadapi tuntutan peningkatan mutu pendidikan. Administrasi menyediakan sistem dan mekanisme pengelolaan lembaga pendidikan, sedangkan supervisi berperan memastikan bahwa proses pendidikan dan pelaksanaan tugas profesional pendidik berjalan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Keduanya tidak dapat dipandang sebagai dua hal yang berdiri sendiri. Administrasi yang baik membutuhkan supervisi sebagai bagian dari pengendalian dan pengembangan mutu, sementara supervisi yang efektif membutuhkan dukungan sistem administrasi yang terencana dan terorganisasi.

Dalam perspektif Pendidikan Agama Islam, administrasi dan supervisi pendidikan juga perlu ditempatkan dalam kerangka pencapaian tujuan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada aspek akademik, tetapi juga pada pembentukan manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, dan mampu memberikan kemaslahatan bagi kehidupan. Pengelolaan pendidikan dengan demikian harus dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai amanah, tanggung jawab, keadilan, keteladanan, musyawarah, dan perbaikan berkelanjutan. Supervisi terhadap pendidik juga seharusnya diarahkan sebagai bentuk pembinaan dan ta'awun dalam kebaikan, sehingga tercipta budaya kerja yang saling mendukung dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Berdasarkan uraian tersebut, pemahaman mengenai orientasi supervisi pendidikan dan teori administrasi pendidikan menjadi penting untuk dikaji secara lebih mendalam. Kajian tersebut diperlukan untuk memahami konsep dan perkembangan orientasi supervisi, landasan teori administrasi pendidikan, serta hubungan keduanya dalam mendukung efektivitas pengelolaan lembaga pendidikan. Dengan pemahaman yang komprehensif, administrasi dan supervisi pendidikan diharapkan tidak hanya menjadi aktivitas manajerial dan pengawasan, tetapi menjadi bagian integral dari upaya peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan profesional pendidik secara berkelanjutan.



2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Fokus utama dari kajian ini adalah mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam mengenai orientasi supervisi pendidikan serta penerapan berbagai teori administrasi dalam pengelolaan lembaga pendidikan secara efektif. Pendekatan kepustakaan dipilih karena objek kajian menitikberatkan pada penelusuran konseptualisasi teoretis dan integrasi nilai-nilai filosofis, khususnya dalam mensintesis paradigma manajemen profesional dengan perspektif Pendidikan Agama Islam guna mewujudkan tata kelola kelembagaan yang optimal.

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan menghimpun dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan lokus penelitian. Sumber data primer bersandar pada literatur otoritatif di bidang manajemen dan supervisi pendidikan, di antaranya kerangka dasar administrasi yang diuraikan oleh Purwanto (2017) dan tata kelola manajerial oleh Arikunto dan Yuliana (2017). Selain itu, untuk membedah dimensi pembinaan pendidik, kajian ini juga menelaah perkembangan teknik supervisi, termasuk pendekatan supervisi klinis dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana yang dikonseptualisasikan oleh para pakar seperti Acheson dan Gall (1992) serta Sahertian (2010).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analysis) yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap pesan-pesan teoretis dari berbagai literatur. Peneliti melakukan kategorisasi dan komparasi terhadap evolusi teori administrasi—mulai dari teori klasik, teori hubungan manusiawi, teori perilaku, hingga teori sistem—lalu mengaitkannya dengan fungsi pengawasan dan pembinaan di sekolah. Pada tahap akhir, data yang telah direduksi tersebut disintesis dengan nilai-nilai spiritualitas Islam, seperti asas ta'awun (tolong-menolong) dan musyawarah, guna merumuskan kerangka tata kelola administrasi dan supervisi pendidikan yang komprehensif dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan.

3. Hasil dan Diskusi

Supervisi Pendidikan Dan Orientasinya

Pengertian Supervisi Pendidikan

Supervisi pendidikan merupakan salah satu bagian penting dalam pengelolaan lembaga pendidikan yang berorientasi pada peningkatan mutu proses dan hasil pendidikan. Secara konseptual, supervisi tidak dapat dipahami hanya sebagai kegiatan mengawasi atau mengontrol pelaksanaan tugas pendidik. Supervisi merupakan proses pemberian bantuan profesional kepada pendidik dan tenaga kependidikan agar mampu mengembangkan kompetensinya serta melaksanakan tugas secara lebih efektif dalam mencapai tujuan pendidikan (Priansa & Somad, 2021).

Istilah supervisi berasal dari kata supervision, yang secara umum berarti pengawasan atau pengamatan dari pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap suatu kegiatan. Namun, dalam perkembangan konsep pendidikan modern, makna supervisi mengalami perluasan. Supervisi tidak lagi ditekankan pada kegiatan mencari kesalahan atau menilai kelemahan pendidik, melainkan lebih diarahkan pada proses pembinaan, pendampingan, pengembangan profesional, dan perbaikan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan.

Dalam konteks sekolah, supervisi pendidikan dapat dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas sekolah, maupun pihak lain yang memiliki kewenangan dan kompetensi dalam pembinaan profesional pendidik. Kegiatan supervisi dapat mencakup perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian hasil belajar, pengembangan kompetensi guru, serta berbagai aspek lain yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan. Dengan demikian, supervisi memiliki fungsi strategis sebagai bagian dari sistem penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan (Arikunto & Yuliana, 2017).

Supervisi pendidikan juga perlu dipahami sebagai proses yang bersifat kolaboratif. Supervisor tidak semata-mata menempatkan dirinya sebagai pihak yang lebih tinggi dan guru sebagai objek yang diawasi. Hubungan tersebut seharusnya dibangun melalui komunikasi, dialog, refleksi, dan kerja sama. Guru diberi kesempatan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran, kemudian bersama-sama mencari alternatif solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik.

Tujuan Supervisi Pendidikan

Tujuan utama supervisi pendidikan adalah membantu pendidik meningkatkan kemampuan profesionalnya sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan mampu memberikan dampak positif terhadap perkembangan peserta didik. Supervisi dengan demikian tidak berhenti pada penilaian kinerja, tetapi harus menghasilkan tindak lanjut berupa perbaikan dan pengembangan.

Secara lebih khusus, tujuan supervisi pendidikan dapat mencakup beberapa hal. Pertama, membantu guru meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Kedua, membantu guru mengidentifikasi berbagai permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran dan menemukan solusi yang tepat. Ketiga, mendorong guru untuk melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran yang telah dilaksanakan. Keempat, menciptakan budaya akademik dan profesional yang mendorong guru untuk terus belajar dan berkembang. Kelima, mendukung terciptanya peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan (Sahertian, 2010).

Tujuan tersebut menunjukkan bahwa supervisi memiliki dimensi pengembangan yang kuat. Supervisi yang hanya menghasilkan laporan penilaian tanpa adanya pembinaan dan tindak lanjut belum sepenuhnya mencerminkan hakikat supervisi pendidikan. Oleh karena itu, hasil supervisi seharusnya menjadi dasar untuk menentukan program pembinaan, pelatihan, pendampingan, atau pengembangan profesional berikutnya.

Fungsi Supervisi Pendidikan

Supervisi pendidikan memiliki beberapa fungsi yang saling berkaitan. Pertama, fungsi pembinaan, yaitu membantu pendidik meningkatkan kemampuan dan kualitas pelaksanaan tugas profesionalnya. Kedua, fungsi pengawasan, yaitu memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan standar, kebijakan, dan tujuan yang telah ditetapkan. Ketiga, fungsi evaluasi, yaitu memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pembelajaran dan kinerja pendidikan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan. Keempat, fungsi pengembangan, yaitu mendorong munculnya inovasi dan peningkatan profesionalisme pendidik. Keempat fungsi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan bukanlah satu-satunya orientasi supervisi. Pengawasan memang diperlukan dalam organisasi pendidikan, tetapi pengawasan yang tidak disertai pembinaan berpotensi menjadikan supervisi bersifat administratif dan kurang memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Oleh sebab itu, fungsi pengawasan perlu ditempatkan sebagai bagian dari siklus pembinaan dan perbaikan mutu.

Prinsip-Prinsip Supervisi Pendidikan

Pelaksanaan supervisi pendidikan perlu berpedoman pada prinsip-prinsip tertentu agar kegiatan supervisi tidak berubah menjadi aktivitas inspeksi yang bersifat mencari kesalahan. Supervisi hendaknya dilaksanakan secara objektif, demokratis, konstruktif, kooperatif, dan berkelanjutan.

Prinsip objektivitas berarti supervisi didasarkan pada data dan kondisi nyata, bukan pada prasangka atau penilaian subjektif supervisor. Prinsip demokratis menempatkan guru sebagai mitra yang memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan melakukan refleksi terhadap praktik pembelajarannya. Prinsip konstruktif menghendaki agar hasil supervisi memberikan masukan yang dapat digunakan untuk memperbaiki dan mengembangkan praktik pendidikan.



Sementara itu, prinsip kooperatif menekankan pentingnya kerja sama antara supervisor dengan guru dalam menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan.

Selain itu, supervisi perlu dilaksanakan secara berkelanjutan. Peningkatan profesionalisme guru bukan proses yang dapat diselesaikan melalui satu kali observasi. Supervisi perlu menjadi bagian dari budaya sekolah yang mendorong evaluasi, refleksi, pembinaan, dan perbaikan secara terus-menerus.

Orientasi Supervisi Pendidikan

Orientasi supervisi pendidikan berkaitan dengan arah dan cara pandang yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan supervisi. Perubahan paradigma pendidikan turut memengaruhi perubahan orientasi supervisi. Supervisi yang sebelumnya lebih menekankan pengawasan dan kepatuhan terhadap aturan berkembang menuju supervisi yang menempatkan pengembangan profesional pendidik sebagai tujuan utama (Pidarta, 2009).

Orientasi pertama adalah orientasi administratif dan pengawasan. Pada orientasi ini, supervisi lebih banyak diarahkan untuk memastikan bahwa guru melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Aspek yang diperhatikan antara lain kelengkapan administrasi pembelajaran, kehadiran, perangkat pembelajaran, pelaksanaan program, serta pemenuhan berbagai standar. Orientasi ini tetap diperlukan karena lembaga pendidikan membutuhkan keteraturan dan akuntabilitas. Namun, apabila dilakukan secara berlebihan, supervisi dapat kehilangan fungsi pembinaannya.

Orientasi kedua adalah orientasi pengembangan profesional. Supervisi diarahkan untuk membantu guru meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi dalam melaksanakan pembelajaran. Supervisor berperan sebagai pembina dan fasilitator yang membantu guru menemukan kekuatan serta aspek yang masih perlu dikembangkan. Orientasi ini menempatkan guru sebagai subjek yang aktif dalam proses pengembangan profesionalnya.

Orientasi ketiga adalah orientasi klinis dan reflektif. Supervisi klinis menekankan proses yang sistematis melalui tahapan perencanaan, observasi, analisis, dan pemberian umpan balik terhadap praktik pembelajaran. Guru tidak hanya menerima penilaian dari supervisor, tetapi diajak melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Dengan pendekatan tersebut, supervisi dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran profesional guru terhadap praktik pembelajarannya sendiri (Acheson & Gall, 1992).

Orientasi keempat adalah orientasi kolaboratif. Dalam orientasi ini, supervisor dan guru dipandang sebagai mitra yang bersama-sama mengidentifikasi masalah, menganalisis penyebab, dan menentukan alternatif perbaikan. Hubungan yang dibangun bukan hubungan yang semata-mata hierarkis, melainkan hubungan profesional yang dilandasi komunikasi dan kepercayaan. Orientasi kolaboratif menjadi relevan karena permasalahan pendidikan semakin kompleks dan tidak selalu dapat diselesaikan melalui instruksi dari pihak supervisor.

Dengan demikian, orientasi supervisi pendidikan pada dasarnya mengalami pergeseran dari paradigma kontrol menuju pembinaan, dari inspeksi menuju pengembangan, dan dari hubungan hierarkis menuju hubungan kolaboratif. Pergeseran tersebut bukan berarti aspek pengawasan harus dihilangkan, tetapi pengawasan perlu ditempatkan sebagai salah satu bagian dari proses peningkatan mutu dan pengembangan profesional.

Supervisi Pendidikan dalam Perspektif Pendidikan Islam

Dalam perspektif Pendidikan Islam, supervisi dapat dikaitkan dengan nilai amanah, tanggung jawab, nasihat, dan perbaikan berkelanjutan. Setiap individu yang diberi tanggung jawab dalam pendidikan memiliki kewajiban untuk melaksanakan amanah tersebut secara optimal. Oleh karena itu, supervisi dapat dipahami sebagai salah satu bentuk ikhtiar untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelaksanaan amanah pendidikan.

Prinsip tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-'Ashr ayat 1-3 yang menegaskan pentingnya saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Nilai tersebut dapat menjadi landasan moral dalam pelaksanaan supervisi, karena supervisi idealnya tidak

dimaksudkan untuk memperlakukan atau menjatuhkan pihak yang disupervisi, tetapi memberikan nasihat, pendampingan, dan dorongan untuk melakukan perbaikan.

وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

“Dan mereka saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran.” (QS. Al-'Ashr: 3)

Ayat tersebut memberikan landasan nilai bahwa proses peningkatan kualitas pendidikan dapat dilakukan melalui budaya saling menasihati dalam kebaikan. Dalam praktik supervisi, nilai tersebut dapat diwujudkan melalui pemberian umpan balik yang santun, objektif, konstruktif, dan berorientasi pada perbaikan.

Dengan demikian, supervisi pendidikan dalam perspektif Islam bukan sekadar mekanisme pengawasan terhadap kinerja guru, melainkan bagian dari proses islah atau perbaikan yang dilakukan secara bertanggung jawab. Supervisor memiliki tanggung jawab untuk memberikan pembinaan, sedangkan guru memiliki kesempatan untuk melakukan refleksi dan meningkatkan kualitas dirinya. Orientasi semacam ini menjadikan supervisi sebagai instrumen pengembangan profesional sekaligus sarana membangun budaya pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Konsep Dan Teori Administrasi Pendidikan

Administrasi pendidikan merupakan proses pengelolaan berbagai sumber daya pendidikan secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Administrasi pendidikan mencakup serangkaian kegiatan yang dilakukan melalui kerja sama antara berbagai pihak dalam lembaga pendidikan, baik kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, maupun pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, administrasi pendidikan tidak hanya berkaitan dengan kegiatan pencatatan atau pekerjaan tata usaha, tetapi mencakup keseluruhan proses pengelolaan pendidikan (Arikunto & Yuliana, 2017).

Dalam pengertian yang lebih luas, administrasi pendidikan dapat dipahami sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi terhadap seluruh komponen pendidikan. Komponen tersebut meliputi sumber daya manusia, kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pembiayaan, hubungan sekolah dengan masyarakat, serta berbagai program pendidikan lainnya. Administrasi yang baik memungkinkan setiap komponen tersebut bekerja secara terarah dan saling mendukung dalam mencapai tujuan lembaga pendidikan (Nawawi, 1985).

Administrasi pendidikan juga memiliki dimensi sosial karena pelaksanaannya melibatkan kerja sama antarmanusia. Keberhasilan administrasi tidak hanya ditentukan oleh tersedianya struktur dan prosedur, tetapi juga oleh kemampuan pemimpin dalam mengoordinasikan individu dan kelompok, membangun komunikasi, serta menciptakan iklim kerja yang kondusif. Oleh sebab itu, administrasi pendidikan memiliki hubungan yang erat dengan kepemimpinan, manajemen, dan supervisi pendidikan.

Tujuan dan Fungsi Administrasi Pendidikan

Tujuan utama administrasi pendidikan adalah menciptakan pengelolaan pendidikan yang terarah sehingga tujuan pendidikan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Efektivitas berkaitan dengan tingkat ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan efisiensi berkaitan dengan kemampuan menggunakan sumber daya secara optimal dan bertanggung jawab.

Administrasi pendidikan memiliki beberapa fungsi utama, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan atau pengarahan, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi. Perencanaan menjadi dasar untuk menentukan tujuan, program, strategi, serta sumber daya yang diperlukan. Pengorganisasian berfungsi membagi tugas, wewenang, dan tanggung jawab agar



setiap individu memahami perannya. Pelaksanaan atau pengarahan berkaitan dengan upaya menggerakkan seluruh sumber daya agar program dapat berjalan sesuai rencana.

Selanjutnya, koordinasi diperlukan agar berbagai kegiatan dalam lembaga pendidikan tidak berjalan secara terpisah, tetapi saling mendukung. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku. Adapun evaluasi digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program sekaligus mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki. Dengan demikian, fungsi administrasi membentuk suatu siklus yang berlangsung secara berkelanjutan (Purwanto, 2017).

Teori-Teori Administrasi Pendidikan

Perkembangan administrasi pendidikan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teori administrasi secara umum. Berbagai teori memberikan perspektif yang berbeda mengenai bagaimana organisasi seharusnya dikelola. Beberapa teori yang relevan dalam administrasi pendidikan antara lain teori klasik, teori hubungan manusiawi, teori perilaku, dan teori sistem.

a. Teori Klasik

Teori klasik menekankan pentingnya struktur organisasi, pembagian kerja, hierarki, wewenang, aturan, serta efisiensi dalam mencapai tujuan organisasi. Tokoh-tokoh yang sering dikaitkan dengan perkembangan teori ini antara lain Frederick W. Taylor, Henri Fayol, dan Max Weber.

Dalam lembaga pendidikan, prinsip teori klasik dapat diterapkan melalui pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, struktur organisasi sekolah, penyusunan prosedur kerja, serta pengaturan kewenangan setiap bagian. Kepala sekolah, misalnya, memiliki tanggung jawab kepemimpinan dan koordinasi, sedangkan guru, tenaga administrasi, dan tenaga kependidikan lainnya memiliki tugas sesuai bidang masing-masing.

Teori klasik memberikan kontribusi penting dalam menciptakan keteraturan organisasi. Namun, apabila diterapkan secara kaku, teori ini memiliki keterbatasan karena cenderung menempatkan manusia sebagai bagian dari struktur organisasi dan kurang memberikan perhatian terhadap kebutuhan sosial serta psikologis anggota organisasi.

b. Teori Hubungan Manusiawi

Teori hubungan manusiawi berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan pendekatan klasik yang terlalu menekankan struktur dan efisiensi. Teori ini memberikan perhatian lebih besar terhadap manusia sebagai individu yang memiliki kebutuhan sosial, emosional, dan psikologis.

Dalam administrasi pendidikan, teori hubungan manusiawi menekankan pentingnya komunikasi, kerja sama, motivasi, penghargaan, dan hubungan interpersonal yang baik. Kepala sekolah tidak hanya berperan sebagai pengarah dan pengendali, tetapi juga sebagai pemimpin yang mampu membangun hubungan positif dengan guru dan tenaga kependidikan.

Penerapan pendekatan ini dapat dilakukan melalui komunikasi terbuka, musyawarah dalam pengambilan keputusan, pemberian apresiasi terhadap kinerja guru, serta penciptaan lingkungan kerja yang saling menghargai. Dengan demikian, keberhasilan administrasi tidak hanya diukur dari keteraturan prosedur, tetapi juga dari kemampuan lembaga menciptakan hubungan kerja yang sehat dan produktif.

c. Teori Perilaku

Teori perilaku memandang bahwa efektivitas organisasi sangat dipengaruhi oleh perilaku individu dan kelompok yang berada di dalamnya. Perhatian diarahkan pada aspek kepemimpinan, motivasi, pengambilan keputusan, komunikasi, serta dinamika kelompok.

Dalam konteks pendidikan, teori ini dapat diterapkan dengan memperhatikan karakteristik, motivasi, kompetensi, dan kebutuhan guru maupun tenaga kependidikan. Kepala sekolah perlu memahami bahwa setiap pendidik memiliki latar belakang, pengalaman, kemampuan, dan kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, pendekatan kepemimpinan dan pengelolaan tidak selalu dapat diseragamkan.

Teori perilaku juga memperkuat pentingnya keterlibatan anggota organisasi dalam pengambilan keputusan. Pelibatan guru dalam penyusunan program sekolah, pengembangan kurikulum, kegiatan pengembangan profesional, maupun evaluasi program dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap tujuan lembaga.

d. Teori Sistem

Teori sistem memandang organisasi sebagai suatu kesatuan yang terdiri atas berbagai komponen yang saling berhubungan dan saling memengaruhi. Lembaga pendidikan tidak dapat dipahami hanya berdasarkan satu bagian tertentu karena keberhasilan suatu komponen dapat memengaruhi komponen lainnya.

Dalam administrasi pendidikan, sekolah dapat dipandang sebagai sebuah sistem yang memiliki input, proses, output, dan umpan balik. Input meliputi peserta didik, guru, tenaga kependidikan, sarana prasarana, pembiayaan, serta berbagai sumber daya lainnya. Proses mencakup kegiatan pembelajaran, pengelolaan sekolah, kepemimpinan, administrasi, dan berbagai program pendidikan. Output berupa capaian peserta didik, kualitas lulusan, serta ketercapaian tujuan pendidikan. Selanjutnya, hasil evaluasi menjadi umpan balik untuk memperbaiki input maupun proses (Engkoswara & Komariah, 2015).

Pendekatan sistem memiliki relevansi yang kuat dengan pengelolaan pendidikan karena persoalan pendidikan biasanya bersifat kompleks dan saling berkaitan. Misalnya, rendahnya hasil belajar peserta didik tidak selalu disebabkan oleh kemampuan guru, tetapi dapat berkaitan dengan kurikulum, motivasi peserta didik, sarana pembelajaran, kepemimpinan, lingkungan keluarga, maupun faktor sosial lainnya.

Bidang-Bidang Administrasi Pendidikan

Administrasi pendidikan mencakup berbagai bidang yang saling berkaitan. Pertama, administrasi kurikulum, yaitu pengelolaan kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, dan evaluasi kurikulum. Kedua, administrasi peserta didik, yang meliputi pengelolaan penerimaan, pembinaan, pengembangan, dan layanan peserta didik. Ketiga, administrasi personalia, yang berkaitan dengan pengelolaan guru dan tenaga kependidikan, mulai dari pembagian tugas, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, hingga pembinaan profesional. Keempat, administrasi sarana dan prasarana, yaitu pengelolaan fasilitas pendidikan agar dapat digunakan secara efektif dan efisien. Kelima, administrasi pembiayaan, yang berkaitan dengan perencanaan, penggunaan, pencatatan, pengawasan, dan pertanggungjawaban sumber dana pendidikan. Keenam, administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat, yang bertujuan membangun komunikasi dan kemitraan antara sekolah dengan orang tua, masyarakat, serta berbagai pihak yang berkepentingan terhadap pendidikan.

Pengelolaan berbagai bidang tersebut membutuhkan koordinasi yang baik. Apabila salah satu bidang tidak dikelola secara optimal, hal tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap bidang lainnya. Oleh karena itu, administrasi pendidikan harus dipandang sebagai suatu kesatuan sistem, bukan kumpulan kegiatan administratif yang berdiri sendiri (Daryanto, 2014).

Penerapan Teori Administrasi dalam Pengelolaan Lembaga Pendidikan

Penerapan teori administrasi pendidikan dalam lembaga pendidikan dapat dilakukan dengan menggabungkan berbagai pendekatan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik organisasi. Tidak terdapat satu teori yang dapat digunakan secara mutlak untuk menjawab seluruh persoalan pendidikan. Pendekatan struktural diperlukan untuk menciptakan keteraturan, pendekatan hubungan manusiawi diperlukan untuk membangun kerja sama, teori perilaku diperlukan untuk memahami individu dan kelompok, sedangkan pendekatan sistem diperlukan untuk melihat keterkaitan seluruh komponen pendidikan.

Dalam praktiknya, kepala sekolah sebagai pemimpin lembaga pendidikan memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan berbagai pendekatan tersebut. Kepala sekolah perlu menyusun perencanaan berdasarkan kebutuhan sekolah, membagi tugas secara proporsional, membangun



komunikasi yang efektif, memberdayakan guru dan tenaga kependidikan, mengelola sumber daya secara transparan, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan.

Administrasi pendidikan yang efektif juga harus didukung oleh pengambilan keputusan berbasis data. Data mengenai perkembangan peserta didik, kinerja guru, kehadiran, hasil evaluasi pembelajaran, penggunaan sarana prasarana, dan pelaksanaan program sekolah dapat menjadi dasar dalam menentukan kebijakan. Dengan demikian, administrasi tidak hanya bersifat prosedural, tetapi menjadi instrumen pengambilan keputusan untuk meningkatkan kualitas lembaga pendidikan.

Dalam konteks Pendidikan Agama Islam, penerapan teori administrasi pendidikan perlu dilandasi nilai-nilai Islam seperti amanah, keadilan, musyawarah, tanggung jawab, transparansi, dan ihsan. Pengelolaan lembaga pendidikan bukan semata-mata aktivitas organisasi, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral dalam menyelenggarakan pendidikan. Oleh karena itu, setiap proses administrasi harus diarahkan pada kemaslahatan peserta didik dan tercapainya tujuan pendidikan secara menyeluruh.

Dengan demikian, teori administrasi pendidikan memberikan kerangka konseptual bagi lembaga pendidikan dalam mengelola berbagai sumber daya dan aktivitas secara sistematis. Keberhasilan penerapannya sangat bergantung pada kemampuan lembaga dalam menyesuaikan teori dengan konteks nyata, karakteristik sumber daya manusia, kebutuhan peserta didik, serta tuntutan lingkungan pendidikan. Administrasi yang baik pada akhirnya bukan hanya menghasilkan keteraturan secara administratif, tetapi juga menciptakan kondisi yang mendukung peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Hubungan Supervisi Pendidikan Dan Administrasi Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

Supervisi pendidikan dan administrasi pendidikan merupakan dua komponen yang saling berkaitan dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Administrasi pendidikan berfungsi menyediakan sistem, struktur, prosedur, serta mekanisme pengelolaan berbagai sumber daya pendidikan, sedangkan supervisi pendidikan berperan memastikan pelaksanaan tugas dan proses pendidikan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta mendorong perbaikan secara berkelanjutan. Dengan demikian, keduanya tidak dapat dipandang sebagai dua kegiatan yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian yang saling melengkapi dalam mewujudkan efektivitas pengelolaan pendidikan (Purwanto, 2017).

Hubungan tersebut dapat dilihat dari fungsi administrasi yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi. Supervisi menjadi salah satu instrumen penting dalam memastikan bahwa berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara efektif. Melalui supervisi, pimpinan lembaga pendidikan memperoleh informasi mengenai kondisi nyata di lapangan, termasuk keberhasilan, kendala, maupun kebutuhan pengembangan yang dihadapi pendidik dan tenaga kependidikan. Informasi tersebut kemudian dapat menjadi dasar dalam melakukan perbaikan terhadap perencanaan dan pengelolaan lembaga pendidikan (Arikunto & Yuliana, 2017).

Supervisi juga memiliki hubungan erat dengan pengembangan profesional pendidik. Administrasi pendidikan menyediakan pengaturan mengenai pembagian tugas, program kerja, pengelolaan sumber daya manusia, serta berbagai kebijakan kelembagaan. Namun, keberadaan sistem administrasi yang baik belum menjamin tercapainya mutu pendidikan apabila tidak diikuti dengan peningkatan kompetensi dan kinerja pendidik. Dalam konteks ini, supervisi berfungsi memberikan pendampingan, pembinaan, dan umpan balik kepada pendidik agar mampu melaksanakan tugas secara lebih efektif. Oleh karena itu, supervisi tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan pengawasan, tetapi juga sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia dalam lembaga pendidikan (Sahertian, 2010).

Hubungan supervisi dan administrasi juga dapat dipahami melalui siklus peningkatan mutu pendidikan. Administrasi menetapkan tujuan, merancang program, mengorganisasikan sumber daya, serta menentukan mekanisme pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, supervisi mengamati dan menganalisis pelaksanaan program tersebut, memberikan umpan balik, serta mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki. Hasil supervisi kemudian menjadi bahan evaluasi bagi administrasi untuk melakukan penyesuaian perencanaan dan pengambilan keputusan berikutnya. Pola tersebut membentuk suatu siklus yang berkelanjutan: perencanaan – pelaksanaan – supervisi – evaluasi – perbaikan – perencanaan kembali (Engkoswara & Komariah, 2015).

Dalam praktik pengelolaan sekolah, hubungan tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan. Misalnya, kepala sekolah menyusun program peningkatan kompetensi guru sebagai bagian dari perencanaan administrasi sekolah. Program tersebut kemudian dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan, pendampingan, observasi pembelajaran, diskusi reflektif, dan evaluasi. Hasil supervisi terhadap proses pembelajaran dapat menunjukkan kebutuhan guru terhadap pengembangan metode pembelajaran, pemanfaatan teknologi, asesmen, maupun pengelolaan kelas. Temuan tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menentukan program tindak lanjut. Dengan demikian, supervisi memberikan data dan informasi yang dapat memperkuat proses pengambilan keputusan dalam administrasi pendidikan (Priansa & Somad, 2021).

Hubungan keduanya juga menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan administrasi, tetapi juga oleh kualitas pelaksanaan dan pembinaan terhadap sumber daya manusia. Administrasi yang terlalu berorientasi pada dokumen dapat menyebabkan pengelolaan pendidikan menjadi bersifat administratif semata. Sebaliknya, supervisi yang tidak didukung oleh sistem administrasi yang baik akan mengalami kesulitan dalam merencanakan tindak lanjut, menyediakan sumber daya, dan memastikan keberlanjutan program. Oleh sebab itu, diperlukan integrasi antara sistem administrasi yang tertata dengan supervisi yang bersifat konstruktif, kolaboratif, dan berorientasi pada pengembangan.

Dalam perspektif peningkatan mutu, kepala sekolah memiliki posisi strategis dalam mengintegrasikan administrasi dan supervisi. Kepala sekolah tidak hanya berperan sebagai administrator yang mengatur berbagai sumber daya sekolah, tetapi juga sebagai supervisor yang membina dan mengembangkan profesionalitas pendidik. Integrasi kedua fungsi tersebut memungkinkan pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan kondisi nyata sekolah dan kebutuhan warga sekolah. Dengan demikian, administrasi memberikan arah dan sistem pengelolaan, sedangkan supervisi memberikan informasi, pembinaan, dan umpan balik untuk memastikan sistem tersebut berjalan secara efektif.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hubungan antara supervisi pendidikan dan administrasi pendidikan bersifat fungsional, integratif, dan berkelanjutan. Administrasi pendidikan menyediakan kerangka pengelolaan dan mekanisme pencapaian tujuan, sedangkan supervisi memastikan pelaksanaan pendidikan berjalan sesuai arah yang telah ditetapkan sekaligus mendorong perbaikan terhadap berbagai kelemahan yang ditemukan. Integrasi keduanya pada akhirnya dapat mendukung terciptanya pengelolaan lembaga pendidikan yang efektif, efisien, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Implementasi Orientasi Supervisi Dan Teori Administrasi Pendidikan Dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam

Implementasi supervisi dan administrasi pendidikan dalam perspektif Pendidikan Agama Islam (PAI) tidak hanya diarahkan pada tercapainya efektivitas dan efisiensi pengelolaan lembaga pendidikan, tetapi juga pada terbentuknya proses pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Pengelolaan pendidikan pada hakikatnya merupakan amanah yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan peserta didik. Oleh karena itu, penerapan supervisi dan administrasi pendidikan perlu memadukan aspek profesional dengan nilai moral dan spiritual yang menjadi karakteristik pendidikan Islam (Muhaimin, 2012).



1. Implementasi Orientasi Supervisi dalam Pendidikan Agama Islam

Orientasi supervisi dalam lembaga pendidikan Islam perlu diarahkan pada pembinaan dan pengembangan profesional pendidik, bukan semata-mata mencari kesalahan atau menilai kelemahan guru. Supervisor, khususnya kepala sekolah atau kepala madrasah, memiliki tanggung jawab untuk membantu pendidik meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus menjaga agar proses pendidikan tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Supervisi dapat dilakukan melalui observasi pembelajaran, diskusi, pemberian umpan balik, pendampingan, serta tindak lanjut berdasarkan kebutuhan masing-masing pendidik (Sahertian, 2010).

Dalam konteks PAI, supervisi juga perlu memperhatikan keterpaduan antara kompetensi pedagogis, profesional, sosial, dan kepribadian dengan nilai-nilai akhlak. Guru PAI tidak hanya dituntut mampu menyampaikan materi keagamaan, tetapi juga menjadi teladan dalam sikap, kedisiplinan, tanggung jawab, dan perilaku sehari-hari. Karena itu, supervisi hendaknya tidak berhenti pada pemeriksaan perangkat pembelajaran, tetapi juga mendorong guru melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran dan keteladanan yang diberikan kepada peserta didik.

Orientasi supervisi tersebut sejalan dengan prinsip ta'awun atau saling membantu dalam kebaikan. Allah Swt. berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.” (QS. Al-Ma'idah: 2).

Ayat tersebut dapat menjadi landasan nilai bahwa supervisi dalam pendidikan Islam hendaknya dilaksanakan sebagai bentuk kerja sama untuk meningkatkan kebaikan dan kualitas pendidikan. Dengan demikian, hubungan antara supervisor dan guru bukan semata-mata hubungan atasan dan bawahan, melainkan hubungan profesional yang dibangun melalui pembinaan, komunikasi, dan tanggung jawab bersama.

2. Implementasi Teori Administrasi dalam Pengelolaan Pendidikan Islam

Penerapan teori administrasi pendidikan dalam lembaga pendidikan Islam dapat dilakukan dengan menyesuaikan prinsip-prinsip teori administrasi dengan karakteristik, kebutuhan, dan nilai-nilai lembaga. Teori klasik, misalnya, dapat diterapkan dalam penyusunan struktur organisasi, pembagian tugas, kewenangan, dan prosedur kerja. Pembagian tugas yang jelas diperlukan agar setiap pendidik dan tenaga kependidikan memahami tanggung jawabnya sehingga pengelolaan lembaga dapat berjalan secara efektif (Arikunto & Yuliana, 2017).

Teori hubungan manusiawi dapat diterapkan melalui pembangunan komunikasi dan hubungan kerja yang harmonis antara kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan orang tua. Dalam pendidikan Islam, hubungan tersebut perlu dibangun atas dasar ukhuwah, saling menghormati, dan kepedulian. Kepala sekolah tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang mendorong guru untuk berkembang, berpartisipasi, dan merasa memiliki tanggung jawab terhadap kemajuan lembaga.

Sementara itu, teori perilaku dapat diterapkan dengan memperhatikan motivasi, karakter, kebutuhan, serta dinamika individu dan kelompok dalam lembaga pendidikan. Setiap guru memiliki latar belakang, kemampuan, pengalaman, dan kebutuhan pengembangan yang berbeda. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya manusia dalam lembaga pendidikan Islam perlu dilakukan secara manusiawi dan proporsional. Pemberian motivasi, penghargaan, pembinaan, dan kesempatan pengembangan profesional menjadi bagian penting dalam meningkatkan kinerja pendidik (Purwanto, 2017).

Teori sistem juga relevan diterapkan dalam pengelolaan pendidikan Islam karena lembaga pendidikan merupakan suatu sistem yang terdiri atas berbagai komponen yang saling berhubungan. Peserta didik, pendidik, kurikulum, sarana prasarana, pembiayaan, kepemimpinan, lingkungan, serta masyarakat merupakan bagian yang saling memengaruhi. Apabila salah satu

komponen mengalami masalah, maka dapat memengaruhi efektivitas komponen lainnya. Oleh sebab itu, pengelolaan lembaga pendidikan Islam perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi (Engkoswara & Komariah, 2015).

3. Nilai-Nilai Islam sebagai Landasan Administrasi dan Supervisi

Implementasi administrasi dan supervisi dalam pendidikan Islam perlu dilandasi nilai-nilai yang bersumber dari ajaran Islam. Salah satu nilai utama adalah amanah. Setiap tugas dan tanggung jawab dalam lembaga pendidikan merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Allah Swt. berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.” (QS. An-Nisa': 58).

Nilai amanah dalam administrasi pendidikan dapat diwujudkan melalui pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab, penggunaan anggaran secara transparan, pelaksanaan tugas sesuai kewenangan, serta pengambilan keputusan yang mengutamakan kepentingan pendidikan. Sementara dalam supervisi, amanah diwujudkan dengan memberikan penilaian secara objektif, menjaga etika profesional, serta memberikan pembinaan yang bertujuan memperbaiki dan mengembangkan kompetensi pendidik.

Selain amanah, nilai keadilan juga menjadi landasan penting. Supervisi dan administrasi tidak boleh dilakukan secara diskriminatif atau berdasarkan kepentingan pribadi. Setiap pendidik perlu mendapatkan perlakuan yang proporsional sesuai tugas, tanggung jawab, kemampuan, dan kebutuhan pengembangannya. Prinsip keadilan akan menciptakan kepercayaan dan membangun iklim kerja yang sehat dalam lembaga pendidikan.

Nilai musyawarah juga penting dalam pengambilan keputusan. Allah Swt. menggambarkan karakter orang beriman sebagai orang-orang yang menyelesaikan urusan melalui musyawarah:

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

“Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka.”
(QS. Asy-Syura: 38).

Dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam, prinsip musyawarah dapat diterapkan dalam penyusunan program sekolah, evaluasi kegiatan, penyelesaian masalah, serta pengembangan kebijakan. Kepala sekolah dapat melibatkan guru dan tenaga kependidikan dalam proses pengambilan keputusan sehingga kebijakan yang dihasilkan memiliki dasar pertimbangan yang lebih komprehensif dan memperoleh dukungan dari warga sekolah.

4. Implementasi dalam Peningkatan Mutu Pendidikan

Integrasi supervisi dan administrasi dalam perspektif PAI pada akhirnya diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh. Mutu pendidikan Islam tidak hanya diukur berdasarkan pencapaian akademik, tetapi juga mencakup pembentukan karakter, akhlak, kedisiplinan, tanggung jawab, kemampuan sosial, serta penghayatan nilai-nilai keislaman peserta didik.

Implementasinya dapat dilakukan melalui siklus yang sistematis, yaitu perencanaan, pelaksanaan, supervisi, evaluasi, dan tindak lanjut. Pada tahap perencanaan, lembaga menetapkan program dan target berdasarkan visi, misi, kebutuhan peserta didik, serta nilai-nilai Islam. Pada tahap pelaksanaan, seluruh sumber daya diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Supervisi kemudian dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai keterlaksanaan program dan kualitas proses pendidikan. Hasil supervisi menjadi dasar evaluasi dan penyusunan tindak lanjut untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan. (Daryanto, 2014).

Dengan demikian, implementasi orientasi supervisi dan teori administrasi pendidikan dalam perspektif PAI menuntut adanya keseimbangan antara profesionalitas dan nilai spiritual,



efektivitas dan amanah, pengawasan dan pembinaan, serta pencapaian akademik dan pembentukan akhlak. Administrasi memberikan sistem dan arah pengelolaan lembaga, sedangkan supervisi memastikan proses tersebut berjalan dan terus berkembang. Keduanya perlu dilaksanakan dengan berlandaskan nilai Islam sehingga pengelolaan pendidikan tidak hanya menghasilkan lembaga yang efektif secara manajerial, tetapi juga mampu menjalankan fungsi pendidikan sebagai sarana pembentukan manusia yang berilmu, beriman, berakhlak, dan bertanggung jawab.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai orientasi supervisi pendidikan dan teori administrasi pendidikan, dapat disimpulkan bahwa supervisi pendidikan merupakan proses pembinaan dan pendampingan profesional yang bertujuan membantu pendidik meningkatkan kompetensi, kualitas pembelajaran, dan mutu pendidikan. Orientasi supervisi pendidikan mengalami perkembangan dari pendekatan yang semula lebih menekankan pengawasan dan pemeriksaan menuju pendekatan yang konstruktif, kolaboratif, reflektif, dan berorientasi pada pengembangan profesional pendidik. Oleh karena itu, supervisi tidak semata-mata digunakan untuk menemukan kekurangan, tetapi juga menjadi sarana memberikan pendampingan, umpan balik, dan tindak lanjut untuk mendorong perbaikan pendidikan secara berkelanjutan.

Administrasi pendidikan merupakan proses pengelolaan berbagai sumber daya pendidikan secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Dalam pengelolaan lembaga pendidikan, terdapat beberapa teori administrasi yang relevan, antara lain teori klasik, teori hubungan manusiawi, teori perilaku, dan teori sistem. Masing-masing teori memberikan perspektif yang berbeda dalam memahami pengelolaan organisasi pendidikan. Penerapannya perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lembaga sehingga administrasi tidak hanya berorientasi pada struktur, aturan, dan prosedur, tetapi juga memperhatikan aspek manusia, hubungan kerja, perilaku organisasi, serta keterkaitan antarkomponen dalam sistem pendidikan.

Supervisi pendidikan dan administrasi pendidikan memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi dalam mendukung efektivitas pengelolaan serta peningkatan mutu pendidikan. Administrasi menyediakan sistem, struktur, perencanaan, pembagian tugas, dan mekanisme pengelolaan lembaga, sedangkan supervisi berperan memastikan pelaksanaan berbagai program berjalan sesuai dengan tujuan sekaligus memberikan pembinaan dan umpan balik untuk perbaikan. Hubungan tersebut membentuk suatu siklus yang berkelanjutan melalui perencanaan, pelaksanaan, supervisi, evaluasi, dan tindak lanjut. Dengan adanya integrasi antara administrasi dan supervisi, pengelolaan pendidikan dapat dilakukan secara lebih sistematis sekaligus responsif terhadap berbagai kebutuhan dan permasalahan yang muncul dalam proses pendidikan.

Dalam perspektif Pendidikan Agama Islam, implementasi orientasi supervisi dan teori administrasi pendidikan perlu mengintegrasikan prinsip profesionalitas dengan nilai-nilai Islam, seperti amanah, keadilan, tanggung jawab, musyawarah, dan ta'awun. Supervisi diarahkan pada pembinaan dan pengembangan pendidik, sedangkan administrasi dilaksanakan melalui pengelolaan lembaga yang sistematis, transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan. Dengan demikian, pengelolaan pendidikan Islam tidak hanya diarahkan pada pencapaian efektivitas dan efisiensi secara manajerial, tetapi juga pada pembentukan lingkungan pendidikan yang mendukung perkembangan intelektual, spiritual, moral, dan sosial peserta didik.

Secara keseluruhan, supervisi pendidikan dan administrasi pendidikan merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Administrasi memberikan arah, sistem, dan mekanisme pengelolaan, sedangkan supervisi memastikan proses pendidikan berjalan sesuai dengan tujuan serta mendorong adanya perbaikan secara berkelanjutan. Dalam konteks Pendidikan Agama Islam, integrasi keduanya perlu dilaksanakan secara profesional dan berlandaskan nilai-nilai Islam sehingga peningkatan mutu pendidikan dapat berjalan seiring dengan pembentukan peserta didik yang berilmu, beriman, berakhlak, dan bertanggung jawab.



5. Daftar Pustaka

- Acheson, K. A., & Gall, M. D. (1992). *Techniques in the clinical supervision of teachers: Preservice and inservice applications*. Longman.
- Arikunto, S., & Yuliana, L. (2017). *Manajemen pendidikan*. Aditya Media.
- Daryanto. (2014). *Administrasi pendidikan*. Rineka Cipta.
- Engkoswara, & Komariah, A. (2015). *Administrasi pendidikan*. Alfabeta.
- Muhaimin. (2012). *Paradigma pendidikan Islam: Upaya mengefektifkan pendidikan agama Islam di sekolah*. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, H. (1985). *Administrasi pendidikan*. Gunung Agung.
- Pidarta, M. (2009). *Supervisi pendidikan kontekstual*. Rineka Cipta.
- Priansa, D. J., & Somad, R. (2021). *Manajemen supervisi dan kepemimpinan kepala sekolah*. Alfabeta.
- Purwanto, N. (2017). *Administrasi dan supervisi pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- Sahertian, P. A. (2010). *Konsep dasar dan teknik supervisi pendidikan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia*. Rineka Cipta.

